



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24215-24227

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Fitriani Ariska, Sefty Dwi Shinta, Wahyu Kurniawan, Daniel Edy Susanto

^{1,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

fitrianiariska20@gmail.com, seftyashinta01.ss@gmail.com, wahyukur799@gmail.com, eldani483@gmail.com

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat memperkuat pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu telah diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), digitalisasi ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, serta upaya pelestarian lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), masih terdapat berbagai kendala seperti ketergantungan pada sektor primer, rendahnya investasi, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan prinsip ekonomi hijau agar pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu dapat berlangsung secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Provinsi Bengkulu, SDGs.

1. Latar Belakang

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep tersebut mengintegrasikan tiga dimensi utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Sejak disepakatinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, pembangunan berkelanjutan menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Di Indonesia, implementasi pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga seluruh daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta pariwisata menjadi sektor utama yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Komoditas unggulan seperti kopi robusta, kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan masyarakat maupun penerimaan daerah. Selain itu, potensi wisata alam seperti Pantai Panjang, Benteng Marlborough, Danau Dendam Tak Sudah, dan Pulau Enggano memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata

berkelanjutan. Potensi tersebut menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

Meskipun memiliki berbagai potensi ekonomi, pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Infrastruktur yang belum merata, rendahnya investasi, keterbatasan industri pengolahan, tingginya ketergantungan terhadap sektor primer, serta masih adanya tingkat kemiskinan yang relatif tinggi menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air, dan berkurangnya kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 4,80%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,62%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp111,83 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai sekitar Rp57,07 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, serta jasa lainnya. Namun demikian, struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah masih perlu ditingkatkan.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah, antara lain pengembangan ekonomi hijau, peningkatan investasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerintah daerah juga telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian SDGs. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berkelanjutan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi, serta pemanfaatan teknologi. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada tingkat nasional atau provinsi dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dengan Provinsi Bengkulu. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Bengkulu masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta perumusan strategi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Bengkulu. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembangunan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu, menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan indikator PDRB, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kebijakan pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Lokasi penelitian berada di Provinsi Bengkulu dengan objek penelitian berupa kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan serta perkembangan indikator ekonomi daerah. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan pemerintah daerah, publikasi kementerian terkait, dan berbagai artikel ilmiah yang membahas pembangunan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data statistik mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, investasi, serta indikator pembangunan lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, buku, serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara implementasi pembangunan berkelanjutan, perkembangan indikator ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang berasal dari berbagai dokumen resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi pembangunan di Provinsi Bengkulu.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu

Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, serta akses pembiayaan terus dilakukan guna meningkatkan daya saing UMKM. Digitalisasi menjadi strategi penting dalam memperluas akses pasar sehingga pelaku usaha lokal mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya konservasi melalui rehabilitasi kawasan hutan, perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian pencemaran lingkungan, serta pengembangan wisata berbasis ekowisata. Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestarian lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu telah mengakomodasi prinsip Triple Bottom Line melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan. Namun demikian, aspek ekonomi masih didominasi sektor primer sehingga transformasi menuju industri bernilai tambah belum optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Solow yang menekankan pentingnya investasi dan kemajuan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kemudian tambahkan:

Dari perspektif Green Economy, pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan konservasi lingkungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas lingkungan.

3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup stabil meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional maupun global.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2023	4,35
2024	4,62
2025	4,80

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan secara bertahap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai mengalami pemulihan yang didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, perdagangan, dan sektor jasa.

Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi oleh sektor primer sehingga diperlukan transformasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan, hilirisasi komoditas, dan peningkatan investasi.

3.3 Faktor Pendukung Pembangunan Berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Potensi sumber daya alam
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai komoditas unggulan seperti kopi robusta, kelapa sawit, karet, perikanan, dan hasil kehutanan yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Potensi sektor pariwisata
Pantai Panjang, Benteng Marlborough, Danau Dendam Tak Sudah, Pulau Enggano, dan berbagai objek wisata lainnya memberikan peluang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata.
- Dukungan kebijakan pemerintah
Pemerintah daerah terus mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian SDGs melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan UMKM.
- Perkembangan teknologi digital
Digitalisasi ekonomi memberikan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran produk lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.4 Faktor Penghambat Pembangunan Berkelanjutan

Di samping berbagai potensi yang dimiliki, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

Pertama, kualitas infrastruktur di beberapa wilayah masih belum memadai sehingga menghambat distribusi barang dan jasa.

Kedua, investasi swasta masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatra.

Ketiga, struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal.

Keempat, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Kelima, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berpotensi mengurangi keberlanjutan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan konservasi yang memadai.

3.5 Strategi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

Strategi pertama adalah meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan sehingga komoditas unggulan daerah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Strategi kedua adalah mempercepat transformasi digital bagi UMKM melalui peningkatan literasi digital, pemasaran daring, serta kemudahan akses pembiayaan.

Strategi ketiga adalah memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, terutama pada kawasan sentra produksi pertanian dan pariwisata.

Strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan.

Strategi kelima adalah memperkuat pengelolaan lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau, konservasi sumber daya alam, serta pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, optimalisasi kebijakan masih diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

3.6 Keterkaitan Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu perlu dipahami sebagai hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan PDRB tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan apabila manfaatnya belum dirasakan secara luas atau diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan biaya ekologis tinggi. Oleh karena itu, pembacaan terhadap perkembangan ekonomi daerah perlu dilengkapi dengan indikator kemiskinan, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pelayanan dasar, serta kondisi lingkungan. Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, produksi yang bertanggung jawab, dan perlindungan ekosistem sebagai sasaran yang saling memengaruhi (Kementerian PPN/Bappenas, 2021, 2023).

Dalam konteks Bengkulu, dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih sangat bergantung pada produktivitas sumber daya alam. Posisi tersebut dapat menjadi kekuatan karena sektor primer menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi perdesaan, tetapi sekaligus menciptakan kerentanan terhadap perubahan harga komoditas, gangguan iklim, penurunan kualitas lahan, dan keterbatasan nilai tambah. Publikasi PDRB menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran menunjukkan pentingnya membaca pertumbuhan berdasarkan sumber produksi serta komponen permintaan agar pemerintah daerah dapat membedakan pertumbuhan yang bersifat sementara dengan transformasi yang memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2026a, 2026b).

Dimensi sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pertumbuhan, bukan hanya sebagai hasil akhir pembangunan. Peningkatan keterampilan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan akses pembiayaan akan menentukan kemampuan masyarakat untuk memasuki kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ketika kualitas sumber daya manusia belum merata, pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi dapat menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Karena itu, program pengembangan ekonomi perlu disertai dengan pelatihan berbasis kebutuhan sektor unggulan, penguatan kewirausahaan lokal, peningkatan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap kegiatan produktif, serta perlindungan bagi rumah tangga yang terkena dampak perubahan struktur ekonomi.

Dimensi lingkungan juga berfungsi sebagai modal pembangunan. Hutan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, lahan pertanian, dan kawasan wisata merupakan aset yang menghasilkan jasa ekosistem bagi masyarakat dan kegiatan usaha. Kerusakan pada aset tersebut akan meningkatkan biaya produksi, memperbesar risiko bencana, menurunkan produktivitas pertanian, dan mengurangi daya tarik pariwisata. Kerangka ekonomi hijau menekankan bahwa peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja harus berjalan bersama efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, pengendalian pencemaran, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Kementerian PPN/Bappenas, 2022; World Bank, 2021).

Dengan demikian, integrasi ketiga dimensi memerlukan kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat ganda. Rehabilitasi irigasi, misalnya, tidak hanya mendukung produksi pertanian, tetapi juga perlu dirancang untuk menjaga ketersediaan air dan melibatkan kelompok tani. Pengembangan destinasi wisata tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada pendapatan masyarakat lokal, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan, dan pembatasan aktivitas yang melebihi daya dukung. Demikian pula, digitalisasi UMKM perlu dinilai bukan hanya dari jumlah pelaku usaha yang menggunakan platform digital, tetapi juga dari perubahan omzet, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan usahanya.

3.7 Transformasi Struktur Ekonomi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan

Struktur ekonomi Bengkulu yang masih didominasi sektor primer menunjukkan perlunya transformasi menuju kegiatan yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Transformasi tidak berarti meninggalkan pertanian, perkebunan, perikanan, atau kehutanan, melainkan memperkuat hubungan sektor tersebut dengan industri pengolahan, perdagangan, jasa logistik, teknologi, dan pemasaran. Hilirisasi yang sesuai dengan skala dan karakteristik daerah dapat memperpanjang rantai nilai sehingga sebagian besar pendapatan tidak keluar dari wilayah dalam bentuk bahan mentah. Arah tersebut relevan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang menempatkan peningkatan daya saing, penguatan ekonomi daerah, dan kualitas pembangunan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2025).

Komoditas kopi robusta dapat dikembangkan melalui peningkatan mutu pascapanen, standarisasi, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, dan penguatan identitas geografis. Kelapa sawit memerlukan penguatan produktivitas kebun rakyat, kepatuhan lingkungan, tata kelola rantai pasok, dan pengembangan produk turunan yang realistis bagi kapasitas daerah. Pada sektor perikanan, nilai tambah dapat diperoleh melalui fasilitas rantai dingin, pengolahan hasil, pengemasan, dan akses pasar. Strategi tersebut perlu didasarkan pada pemetaan rantai nilai yang menjelaskan posisi petani, nelayan, koperasi, pedagang, industri, penyedia logistik, dan lembaga pembiayaan sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada penyediaan alat, tetapi memperbaiki hubungan antarpelaku.

Hilirisasi juga perlu memperhatikan kelayakan ekonomi, skala pasokan, standar mutu, energi, air, akses jalan, dan kepastian pasar. Pembangunan fasilitas pengolahan tanpa ketersediaan bahan baku yang stabil atau tanpa pembeli yang jelas berisiko menghasilkan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menggunakan pendekatan bertahap, mulai dari penguatan produksi dan mutu, pembentukan kelembagaan

usaha, kontrak pasar, penyediaan logistik, hingga investasi pengolahan. Kajian mengenai perencanaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan menunjukkan bahwa keselarasan antara prioritas pusat, kebutuhan daerah, dan kondisi implementasi merupakan faktor penting agar pembiayaan infrastruktur benar-benar mendukung kegiatan produktif (Pambudi, 2022).

Transformasi struktur ekonomi membutuhkan investasi swasta, tetapi investasi yang dikejar tidak hanya dinilai dari besarnya modal. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja lokal, mentransfer teknologi, menciptakan keterkaitan dengan UMKM, menaati standar lingkungan, dan meningkatkan penerimaan daerah. Laporan perekonomian daerah menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan kinerja lapangan usaha saling memengaruhi pertumbuhan Bengkulu, sehingga penguatan investasi perlu disertai dengan perbaikan iklim usaha, kepastian perizinan, konektivitas, dan kesiapan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2025).

Pengembangan industri pengolahan juga harus menghindari pola pertumbuhan yang menghasilkan tekanan lingkungan baru. Industri berbasis sumber daya perlu menerapkan efisiensi energi dan air, pengurangan limbah, pemanfaatan produk samping, serta pengawasan terhadap pencemaran. Inovasi teknologi hijau dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi risiko lingkungan, tetapi manfaat tersebut memerlukan insentif, kapasitas teknis, akses pembiayaan, dan penegakan aturan yang konsisten (Jastacia & Yonglei, 2023). Dengan demikian, kebijakan hilirisasi harus mengintegrasikan sasaran produksi, daya saing, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan sejak tahap perencanaan.

Bagi Bengkulu, transformasi ekonomi yang paling realistis adalah transformasi yang berbasis pada keunggulan lokal dan tersebar secara spasial. Sentra pengolahan skala kecil dan menengah dapat ditempatkan dekat kawasan produksi untuk mengurangi biaya angkut dan membuka kesempatan kerja di luar pusat kota. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi perlu membagi peran secara jelas dalam pengembangan sentra produksi, jalan penghubung, pasar, promosi investasi, pendidikan vokasi, dan perlindungan lingkungan. Model tersebut dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah sekaligus memperkuat hubungan ekonomi perdesaan dan perkotaan.

Hasil analisis ini menegaskan bahwa peningkatan PDRB akan lebih berkelanjutan apabila berasal dari kenaikan produktivitas, diversifikasi usaha, inovasi, dan penguatan nilai tambah. Ketergantungan pada kenaikan harga komoditas dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu memperbaiki ketahanan ekonomi. Sebaliknya, penguatan kemampuan pengolahan, kualitas produk, jaringan pasar, dan kompetensi tenaga kerja akan memperbesar kapasitas daerah untuk bertahan ketika terjadi perubahan harga atau permintaan global.

3.8 Digitalisasi UMKM sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusif

Digitalisasi UMKM merupakan salah satu jalur yang dapat memperluas pasar, menurunkan biaya transaksi, mempercepat pembayaran, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola informasi. Namun, adopsi teknologi tidak cukup dipahami sebagai penggunaan media sosial atau pendaftaran pada lokapasar. Digitalisasi yang produktif mencakup pencatatan keuangan, manajemen persediaan, pembayaran digital, pemasaran berbasis data, pelayanan pelanggan, pengadaan, dan koordinasi rantai pasok. Penelitian terhadap usaha mikro dan kecil di Indonesia menunjukkan bahwa karakteristik pemilik, kemampuan usaha, pendapatan, dan kondisi pasar memengaruhi keputusan mengadopsi teknologi digital (Trinugroho et al., 2022).

Bagi UMKM Bengkulu, hambatan digitalisasi dapat berasal dari kualitas jaringan, keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, kesulitan membuat konten, kurangnya pencatatan usaha, dan terbatasnya kemampuan memenuhi permintaan secara konsisten. Program pelatihan yang hanya berfokus pada pembuatan akun digital berisiko menghasilkan adopsi yang bersifat formal tetapi tidak meningkatkan kinerja. Karena itu, pendampingan perlu mengikuti tahapan kematangan usaha. Pelaku usaha pemula membutuhkan identitas produk dan pencatatan sederhana, sedangkan usaha yang mulai tumbuh memerlukan integrasi pembayaran, pengelolaan pelanggan, standarisasi mutu, dan sistem logistik.

Pemanfaatan pembayaran elektronik dan perdagangan elektronik dapat memperbaiki kinerja rantai pasok UMKM apabila disertai dengan kesiapan proses internal. Bukti empiris menunjukkan bahwa layanan pembayaran elektronik dan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja rantai pasok UMKM di Indonesia (Kilay et al., 2022). Penelitian lain juga menemukan bahwa e-commerce berkaitan positif dengan omzet, laba, dan pengembalian aset pada industri mikro dan kecil, meskipun besarnya manfaat dapat berbeda menurut skala usaha

(Martini et al., 2023). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan digitalisasi perlu diarahkan pada hasil usaha yang terukur.

Digitalisasi juga membuka peluang bagi produk lokal Bengkulu untuk memperoleh pasar di luar daerah. Kopi, makanan olahan, kerajinan, produk perikanan, dan jasa wisata dapat dipromosikan melalui narasi asal produk, kualitas, dan keberlanjutan. Akan tetapi, pemasaran digital harus didukung oleh kapasitas produksi, kemasan, legalitas, standar keamanan pangan, kecepatan pengiriman, dan mekanisme penanganan keluhan. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan permintaan dapat menimbulkan kegagalan pemenuhan pesanan dan menurunkan kepercayaan konsumen.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, transformasi digital harus memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kajian mengenai transformasi digital berkelanjutan pada UKM menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perlu mencakup Triple Bottom Line, bukan hanya keuntungan finansial (Costa Melo et al., 2023). Dalam praktik daerah, hal ini dapat diterapkan melalui penggunaan teknologi untuk mengurangi pemborosan bahan, memperbaiki perencanaan produksi, memperluas akses kelompok perempuan dan pemuda, serta meningkatkan transparansi transaksi. Pemerintah dapat mengembangkan indikator yang membedakan jumlah UMKM yang sekadar terdaftar secara digital dengan UMKM yang mengalami kenaikan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Ekosistem digital UMKM juga memerlukan kolaborasi dengan perbankan, perusahaan logistik, perguruan tinggi, komunitas usaha, platform digital, dan lembaga sertifikasi. Perguruan tinggi dapat membantu pemetaan kebutuhan, pengembangan desain produk, analisis pasar, dan evaluasi dampak program. Perbankan dan lembaga pembiayaan dapat menggunakan pencatatan transaksi sebagai salah satu dasar penilaian usaha, dengan tetap memperhatikan perlindungan data. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai penghubung agar pelatihan, pembiayaan, standarisasi, dan akses pasar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Strategi digitalisasi yang inklusif harus mencegah kesenjangan baru antara usaha yang sudah memiliki kemampuan digital dan usaha yang tertinggal. Pendampingan tatap muka tetap diperlukan bagi pelaku usaha di wilayah dengan akses terbatas. Pengembangan pusat layanan UMKM pada tingkat kabupaten/kota dapat menyediakan fasilitas bersama, konsultasi, studio produk, akses internet, dan bantuan administrasi. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya menjadi program teknologi, tetapi menjadi instrumen untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.

3.9 Ekonomi Hijau, Ketahanan Lingkungan, dan Pariwisata Berkelanjutan

Ekonomi hijau memberikan kerangka untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau Indonesia menempatkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pengukuran sehingga kemajuan pembangunan tidak hanya dinilai dari kenaikan output (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Bagi Bengkulu, pendekatan ini relevan karena kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem. Penurunan kualitas lingkungan dapat secara langsung mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya sosial.

Pengelolaan lahan dan hutan perlu diarahkan pada pencegahan degradasi, rehabilitasi kawasan, perlindungan daerah tangkapan air, dan kepastian tata ruang. Kebijakan lingkungan yang terdesentralisasi tidak selalu otomatis meningkatkan produktivitas hijau apabila koordinasi, kapasitas pemerintah, dan insentif antardaerah belum memadai. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi kebijakan lingkungan dan kompetisi pemerintah daerah dapat menghasilkan dampak yang kompleks, sedangkan dukungan penelitian, pengembangan, dan kebijakan sektor strategis dapat memperbaiki produktivitas pembangunan hijau (Fajri & Munawaroh, 2023). Temuan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan penguatan kapasitas teknis.

Ketahanan lingkungan juga berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, abrasi, dan gangguan pada produksi pangan dapat memengaruhi pendapatan masyarakat serta belanja pemerintah. Karena itu, adaptasi iklim perlu diintegrasikan ke dalam pembangunan jalan, irigasi, permukiman, pertanian, dan kawasan wisata. Laporan mengenai aksi iklim dan pembangunan Indonesia menekankan bahwa kebijakan iklim dapat dirancang sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, bukan sekadar biaya tambahan, terutama melalui investasi yang tangguh, pengelolaan risiko, dan transisi yang adil (World Bank, 2023).

Pariwisata Bengkulu memiliki peluang untuk tumbuh melalui pengembangan Pantai Panjang, Benteng Marlborough, Danau Dendam Tak Sudah, Pulau Enggano, dan berbagai daya tarik budaya serta alam. Namun, keberhasilan pariwisata berkelanjutan tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan. Indikator perlu mencakup lama tinggal, belanja wisatawan pada usaha lokal, kualitas pekerjaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, kualitas air, perlindungan kawasan, dan kepuasan pengunjung. Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan aktivitas wisata tidak menimbulkan tekanan yang mengurangi kualitas destinasi.

Pengembangan ekowisata perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui homestay, pemandu lokal, kuliner, kerajinan, transportasi, dan jasa pendukung. Pemerintah dapat menetapkan standar layanan dan lingkungan, memberikan pelatihan, serta membangun sistem promosi bersama. Pembatasan kapasitas pada kawasan sensitif, tata kelola sampah, dan mekanisme kontribusi untuk konservasi perlu dirancang sejak awal. Apabila manfaat ekonomi dirasakan masyarakat, dukungan terhadap perlindungan kawasan akan menjadi lebih kuat.

Ekonomi sirkular dapat diterapkan pada sentra usaha dan kawasan wisata melalui pengurangan bahan sekali pakai, pemilahan sampah, pemanfaatan limbah organik, pengolahan produk samping pertanian, dan penggunaan kembali material. Penerapan tersebut dapat membuka usaha baru dan mengurangi biaya pengelolaan lingkungan. Namun, kegiatan ekonomi sirkular memerlukan kepastian pasar bagi produk daur ulang, standar kualitas, fasilitas pengumpulan, serta perubahan perilaku produsen dan konsumen.

Hubungan antara ekonomi hijau dan pekerjaan layak juga perlu diperhatikan. Transisi menuju proses produksi yang lebih bersih membutuhkan teknisi, tenaga pengelola limbah, auditor energi, pendamping pertanian berkelanjutan, dan tenaga pariwisata yang memahami konservasi. Kajian mengenai hubungan indikator ekonomi hijau dan SDG 8 menunjukkan pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, investasi hijau, biodiversitas, dan pengelolaan sumber daya (Wijayanti & Sari, 2024). Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja di Bengkulu dapat mulai memasukkan kompetensi hijau sesuai kebutuhan sektor unggulan.

Secara keseluruhan, ekonomi hijau tidak dimaksudkan untuk menghambat pemanfaatan sumber daya, tetapi memastikan bahwa pemanfaatan tersebut efisien, adil, dan dapat dipertahankan. Kebijakan daerah dapat menggunakan instrumen insentif, standar, pengawasan, pengadaan pemerintah, dan dukungan pembiayaan untuk mendorong pelaku usaha mengadopsi praktik yang lebih bersih. Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan perubahan nyata pada produktivitas sumber daya, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

3.10 Infrastruktur, Investasi, dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya bergantung pada keterhubungan dengan kebutuhan produksi dan pelayanan masyarakat. Jalan yang menghubungkan sentra pertanian dengan pasar, irigasi yang mendukung produktivitas, pelabuhan yang berfungsi baik, jaringan telekomunikasi, listrik yang andal, serta fasilitas penyimpanan dan rantai dingin akan menurunkan biaya ekonomi. Sebaliknya, proyek yang tidak terhubung dengan pola produksi, tata ruang, dan kebutuhan pengguna dapat menimbulkan biaya pemeliharaan tanpa manfaat yang sebanding.

Perencanaan infrastruktur berkelanjutan perlu menggunakan analisis siklus hidup, risiko bencana, dampak lingkungan, dan kemampuan pemeliharaan. Kondisi geografis Bengkulu yang memiliki wilayah pesisir, pegunungan, dan kawasan rawan bencana membutuhkan standar desain yang tangguh. Keputusan investasi perlu mempertimbangkan biaya kerusakan dan gangguan layanan dalam jangka panjang, bukan hanya biaya konstruksi awal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur mendukung ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi risiko fiskal daerah.

Konektivitas fisik perlu dilengkapi dengan konektivitas digital. Laporan perkembangan ekonomi Indonesia menekankan peran fondasi digital, kualitas layanan, keterampilan, dan tata kelola dalam mendorong produktivitas (World Bank, 2025). Di Bengkulu, pemerataan jaringan digital dapat mendukung pendidikan, pelayanan publik, UMKM, informasi harga, pariwisata, dan koordinasi logistik. Namun, penyediaan jaringan harus diikuti oleh peningkatan kemampuan penggunaan agar investasi digital menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Investasi yang berkualitas memerlukan kepastian kebijakan, data potensi yang akurat, proses perizinan yang jelas, dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah dapat menyusun profil investasi berdasarkan rantai nilai,

kebutuhan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, risiko lingkungan, dan peluang kemitraan dengan usaha lokal. Pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan promosi yang hanya menyampaikan ketersediaan komoditas. Reformasi iklim usaha dan peningkatan produktivitas perusahaan merupakan bagian penting dalam memperkuat pertumbuhan jangka menengah (World Bank, 2024).

Penguatan sumber daya manusia harus berjalan searah dengan agenda investasi dan transformasi sektor. Pendidikan dan pelatihan yang tidak terhubung dengan kebutuhan usaha dapat menghasilkan ketidaksesuaian keterampilan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan pelaku usaha perlu menyusun peta kompetensi untuk industri pengolahan, agribisnis, pariwisata, logistik, teknologi digital, dan pekerjaan hijau. Program magang, sertifikasi, dan pelatihan berbasis proyek dapat mempercepat transisi tenaga kerja menuju kegiatan yang lebih produktif.

Aspek inklusivitas perlu dijaga melalui perluasan akses pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan pasar bagi masyarakat perdesaan, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok berpendapatan rendah. Peningkatan investasi dapat memperbesar ketimpangan apabila tenaga kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan atau apabila kegiatan ekonomi terpusat pada wilayah tertentu. Karena itu, indikator keberhasilan investasi perlu memasukkan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan upah, kemitraan dengan UMKM, dan persebaran manfaat antarwilayah.

Dalam jangka menengah, penguatan modal manusia akan menentukan kemampuan Bengkulu keluar dari ketergantungan pada sektor berproduktivitas rendah. Infrastruktur dapat membuka akses, tetapi pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan organisasi menentukan seberapa besar masyarakat memanfaatkan akses tersebut. Oleh sebab itu, alokasi pembangunan perlu menyeimbangkan belanja fisik dengan belanja peningkatan kapasitas, pemeliharaan, riset terapan, dan pendampingan usaha.

3.11 Tata Kelola, Integrasi Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh tata kelola. Banyak sasaran pembangunan melibatkan lebih dari satu organisasi perangkat daerah, tingkat pemerintahan, dan kelompok pemangku kepentingan. Pengembangan pariwisata, misalnya, berkaitan dengan jalan, lingkungan, kebudayaan, UMKM, keamanan, promosi, dan investasi. Tanpa koordinasi, program dapat tumpang tindih atau menghasilkan keluaran yang tidak saling mendukung. Karena itu, integrasi perencanaan perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran, jadwal, indikator, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

RPJMD harus menjadi acuan yang menghubungkan sasaran jangka menengah dengan program tahunan, penganggaran, dan kinerja perangkat daerah. Keselarasan tersebut penting agar perubahan prioritas atau keterbatasan fiskal tidak menghilangkan fokus pada hasil. Pemerintah daerah dapat menggunakan kerangka hasil yang menjelaskan hubungan antara input, keluaran, hasil antara, dan dampak. Contohnya, program digitalisasi UMKM tidak hanya mengukur jumlah peserta pelatihan, tetapi juga tingkat adopsi, transaksi, peningkatan omzet, keberlanjutan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

Pengukuran pembangunan berkelanjutan perlu menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. PDRB dan pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan produktivitas tenaga kerja, kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, investasi, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan, tutupan lahan, pengelolaan sampah, dan ketahanan bencana. Ketersediaan publikasi statistik daerah memberi dasar bagi evaluasi, tetapi pemerintah perlu memastikan konsistensi definisi, pembaruan data, dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025).

Data juga perlu disajikan menurut wilayah, kelompok masyarakat, dan sektor agar ketimpangan tidak tertutupi oleh nilai rata-rata provinsi. Pertumbuhan yang tinggi pada satu sektor atau wilayah belum tentu memperbaiki kondisi wilayah lain. Pemetaan spasial dapat membantu menentukan lokasi prioritas infrastruktur, layanan dasar, pengembangan usaha, dan konservasi. Transparansi data akan memperkuat akuntabilitas serta memungkinkan akademisi dan masyarakat berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan.

Partisipasi pemangku kepentingan diperlukan sejak perencanaan hingga evaluasi. Pelaku usaha dapat memberikan informasi mengenai hambatan produksi dan pasar; masyarakat dapat menjelaskan dampak program; perguruan tinggi dapat mendukung analisis; dan organisasi masyarakat dapat membantu memastikan perhatian pada

kelompok rentan serta lingkungan. Partisipasi yang bermakna harus menggunakan informasi yang dapat dipahami, ruang tanggapan, serta mekanisme tindak lanjut, bukan hanya pertemuan formal.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kemampuan evaluasi kebijakan. Evaluasi tidak hanya menilai penyerapan anggaran, tetapi membandingkan hasil dengan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki desain program. Program yang efektif dapat diperluas, sedangkan program yang tidak memberikan hasil perlu disesuaikan atau dihentikan. Pendekatan ini penting karena sumber daya fiskal terbatas dan kebutuhan pembangunan sangat beragam.

Koordinasi pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan hubungan Provinsi Bengkulu dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Infrastruktur, lingkungan, rantai pasok, dan kawasan wisata sering melintasi batas administrasi. Forum koordinasi perlu menghasilkan keputusan operasional mengenai pendanaan, standar, data, pemeliharaan, dan pengawasan. Dengan tata kelola yang kuat, desentralisasi dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal tanpa kehilangan konsistensi sasaran nasional.

3.12 Sintesis Temuan dan Prioritas Kebijakan Daerah

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara terpisah. Infrastruktur perlu dihubungkan dengan sentra produksi dan layanan; hilirisasi harus didukung pasokan, mutu, pasar, teknologi, dan pengelolaan lingkungan; digitalisasi UMKM harus disertai kesiapan usaha dan akses pembiayaan; sedangkan pariwisata perlu mengintegrasikan manfaat ekonomi lokal dengan perlindungan destinasi. Keterhubungan tersebut akan memperbesar dampak setiap program dan mengurangi risiko pemborosan sumber daya.

Prioritas pertama adalah memperkuat produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan melalui pemetaan rantai nilai, standardisasi, pengolahan, logistik, dan akses pasar. Prioritas kedua adalah meningkatkan kualitas investasi dengan menekankan penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, kemitraan UMKM, dan kepatuhan lingkungan. Prioritas ketiga adalah memperluas transformasi digital yang berbasis kebutuhan dan hasil usaha. Prioritas keempat adalah membangun ketahanan lingkungan serta iklim melalui konservasi, pengendalian pencemaran, ekonomi sirkular, dan infrastruktur tangguh. Prioritas kelima adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia dan tata kelola data.

Pelaksanaan prioritas tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan. Kawasan produksi pertanian dan perkebunan memerlukan paket intervensi yang berbeda dengan kawasan pesisir atau destinasi wisata. Pendekatan kawasan memungkinkan pemerintah mengintegrasikan jalan, irigasi, energi, internet, fasilitas pengolahan, pelatihan, pembiayaan, dan perlindungan lingkungan dalam satu lokasi prioritas. Hasilnya akan lebih mudah diukur daripada program yang tersebar tanpa keterkaitan.

Pembiayaan pembangunan perlu menggunakan kombinasi APBD, dukungan pemerintah pusat, investasi swasta, perbankan, dan kemitraan. Pemilihan sumber pembiayaan harus mempertimbangkan karakter manfaat dan risiko. Infrastruktur publik dasar tetap memerlukan peran pemerintah, sedangkan kegiatan komersial dapat melibatkan swasta dengan pengaturan yang menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Setiap skema pembiayaan perlu memiliki tanggung jawab pemeliharaan dan indikator hasil yang jelas.

Akhirnya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus dilihat sebagai proses peningkatan kapasitas daerah. Keberhasilan tidak hanya tampak pada kenaikan PDRB tahunan, tetapi pada kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, mengurangi ketimpangan, menghadapi guncangan, dan menjaga modal alam. Dengan konsistensi perencanaan, kolaborasi, dan evaluasi berbasis data, Provinsi Bengkulu memiliki peluang untuk mengubah kekayaan sumber daya menjadi kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu telah berjalan melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta upaya konservasi lingkungan menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer, keterbatasan investasi, kualitas infrastruktur yang belum merata, serta masih rendahnya nilai tambah hasil produksi daerah. Selain itu, ancaman terhadap kelestarian lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi perhatian penting agar pembangunan ekonomi tidak mengurangi kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan strategi pembangunan yang lebih komprehensif melalui peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, percepatan digitalisasi UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pembangunan infrastruktur, serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkesinambungan.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). Provinsi Bengkulu dalam angka 2025. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/655a1b91f093e3a2c2d6615f/provinsi-bengkulu-dalam-angka-2025.html>
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026a). Produk domestik regional bruto Provinsi Bengkulu menurut lapangan usaha 2021–2025. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2026/04/06/ba88d4dc641c385a239e8c62/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bengkulu-menurut-lapangan-usaha-2021-2025.html>
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026b). Produk domestik regional bruto Provinsi Bengkulu menurut pengeluaran 2021–2025. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2026/04/13/7f667539bcc92a1a2415cf68/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bengkulu-menurut-pengeluaran-2021-2025.html>
4. Bank Indonesia. (2025). Laporan perekonomian Provinsi Bengkulu 2025. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bengkulu-2025.aspx>
5. Costa Melo, D. I., Queiroz, G. A., Alves Junior, P. N., Sousa, T. B. D., Yushimito, W. F., & Pereira, J. (2023). Sustainable digital transformation in small and medium enterprises (SMEs): A review on performance. *Heliyon*, 9(3), Article e13908. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13908>
6. Fajri, M. N., & Munawaroh, S. (2023). Exploring sustainable economic growth: Promoting green development productivity through decentralized environmental policy and regional competitiveness. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(3), 246–262. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i3.422>
7. Jastacia, B., & Yonglei, S. (2023). How new green technologies are changing the Indonesian economy. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(3), 231–245. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i3.458>
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Indonesia's voluntary national review 2021: Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 agenda. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/IND_VNR2021_File-upload.pdf
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Green economy index: A step forward to measure the progress of low carbon and green economy in Indonesia. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2022/08/Green-Economy-Index-A-Step-Forward-to-Measure-the-Progress-of-Low-Carbon-and-Green-Economy-in-Indonesia.pdf>
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Laporan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2023. Kementerian PPN/Bappenas.
11. Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The influence of e-payment and e-commerce services on supply chain performance: Implications of open innovation and solutions for the digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
12. Martini, Setiawan, D., Adhariani, D., Harymawan, I., & Widodo, M. (2023). E-commerce and micro and small industries performance: The role of firm size as a moderator. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), Article 100142. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100142>
13. Pambudi, A. S. (2022). The challenges of physical special allocation fund (SAF) planning for sustainable economic infrastructure provision. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2), 118–135. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.303>
14. Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. <https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah-provinsi-bengkulu-nomor-4-tahun-2025-tentang-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-provinsi-bengkulu-71f9b8>
15. Trinugroho, I., Pamungkas, P., Wiwoho, J., Damayanti, S. M., & Pramono, T. (2022). Adoption of digital technologies for micro and small business in Indonesia. *Finance Research Letters*, 45, Article 102156. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102156>
16. Wijayanti, Y. R., & Sari, I. C. (2024). Reinvigorating sustainable green economics in Indonesia: Exploring the nexus between Global Green Economy Index and SDG 8. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(3), 203–216. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.612>
17. World Bank. (2021). Indonesia economic prospects, December 2021: A green horizon—Toward a high growth and low carbon economy. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-december-2021>
18. World Bank. (2023). Indonesia economic prospects, December 2023: Climate action for development. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
19. World Bank. (2024). Indonesia economic prospects: Unleashing Indonesia's business potential. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099062124085019387>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12817>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

20. World Bank. (2025). Indonesia economic prospects: Digital foundations for growth.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099121525010013017>